

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum Ibu Kota Indonesia dipindahkan ke IKN pada tahun 2024 mendatang, Jakarta masih menjadi Ibu kota Negara Republik Indonesia hingga saat ini. DKI Jakarta pun memiliki tingkat perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Tingginya tingkat pertumbuhan sebuah daerah apabila tidak diimbangi dengan perluasan wilayah sebuah daerah maka daerah tersebut akan muncul sebuah akar dari segala masalah yaitu kepadatan penduduk, yang dimana dari kepadatan penduduk ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti masalah sosial, ekonomi, dan lainnya.

Dikarenakan adanya desakan pertumbuhan DKI Jakarta yang cukup tinggi maka keterbutuhan lahan pun semakin meningkat, sedangkan lahan yang ada di Ibu kota saat ini semakin terbatas. Hingga sulitnya proses pembebasan lahan guna perluasan wilayah bagi pengembangan Kota Jakarta, telah mendesak Pemerintah Jakarta untuk membuat kebijakan reklamasi pantai sebagai upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Supono (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi juga diperlukan sebagai pendorong dan penopang keberlanjutan Kota Jakarta agar bisa menyaingi kota-kota besar yang ada di negara lain. Kebijakan ini ditandai dengan adanya Pemerintah Kota Jakarta yang mengeluarkan izin reklamasi di wilayah Pantai Utara Jakarta. Demi memenuhi desakan akan usaha keterbutuhan lahan,

Pemerintah menjadikan reklamasi pantai sebagai konsekuensi logis untuk pengadaan lahan baru sebagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Oleh sebab itu tidak heran jika sering kali belakangan ini kita mendengar atau melihat berita terkait usaha mereklamasi pantai semakin banyak bermunculan. Reklamasi sendiri memiliki beberapa definisi. Dalam istilah reklamasi berasal dari bahasa inggris yaitu *reclamation* yang artinya pekerjaan memperoleh tanah. Jadi reklamasi pantai merupakan sebuah upaya atau pekerjaan untuk menambah lahan atau memperluas wilayah daratan ke arah laut dengan luasan tertentu dengan cara. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang melalui penimbunan, pengeringan lahan, atau drainase guna meningkatkan manfaat sumber daya lahan dari segi lingkungan hidup dan sosial ekonomi. Mengacu pada undang-undang tersebut, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijaga dalam kaitannya dengan kegiatan reklamasi pantai ini, yaitu kelestarian kehidupan dan penghidupan masyarakat, kemudian keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan perlindungan fungsi lingkungan hidup pesisir dan pulau-pulau kecil, serta persyaratan teknis material untuk ekstraksi, pengerukan dan drainase.

Pembangunan berkelanjutan dalam proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK 2) sangat bergantung pada peran aktif Pemerintah DKI Jakarta sebagai otoritas yang berwenang memberikan izin dan pengawasan. Pemerintah memiliki tanggung jawab krusial dalam memastikan bahwa para pengembang (developer) proyek reklamasi ini mematuhi seluruh persyaratan dan regulasi yang ditetapkan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kewenangan

pemerintah dalam proses perizinan ini menjadi instrumen penting yang menentukan arah dan kualitas pembangunan reklamasi, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat sekitar dan lingkungan pesisir (Rigo & Qidam, 2020).

Peraturan yang mengatur terkait reklamasi pantai ini adalah Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perpres No.122/2012) bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Pasal 34 ayat (1) UU No. 27/2007 mengatur Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dapat dilaksanakan semata-mata dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial-ekonomi. Dalam aturan ini sendiri menjelaskan bahwa reklamasi boleh dilakukan apabila sebuah kegiatan tersebut menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih banyak dibanding biaya sosial dan ekonomi. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI yang memiliki sebuah wewenang akan pemberian izin atau persetujuan akan keberlanjutannya proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

Dalam penelitiannya Gunawan (2014) menegaskan bahwa pemerintah sendiri tentunya tidak semata-mata membuat sebuah regulasi tanpa menimbang apakah keputusan yang akan dikeluarkan dapat memberikan manfaat atau

memikirkan suatu dampak yang diperoleh dari suatu keputusan tersebut, pemerintah akan membuat suatu kebijakan dengan matang yang mana akhirnya kebijakan tersebut dapat diterapkan dan dilaksanakan, dan pastinya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pun memiliki tujuan dan manfaat bagi masyarakat luas.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembangunan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) tentunya memiliki tujuan dan manfaat. Yang mana tujuan pemerintah sendiri guna memperluas wilayah serta meningkatkan nilai guna atau memanfaatkan sebuah lahan yang tidak terpakai menjadi sebagai sarana masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi, yang dimaksudkan reklamasi ini nantinya akan dijadikan sebagai sarana tempat tinggal atau perumahan dan juga dijadikan sebagai fasilitas yang akan mendukung perekonomian suatu wilayah.

Namun realitanya kebijakan ini menyebabkan sebuah implikasi terhadap masyarakat yang ada di sekitar PIK 2 dan melahirkan sebuah kontra di masyarakat terhadap keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan persetujuan atas keberlanjutan proyek ini. Dikarenakan kebijakan ini yang seharusnya ditujukan untuk dijadikan sebuah inovasi yang akan memberikan banyak manfaat dan kepentingan bagi masyarakat luas untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan, namun hal ini bertentangan dengan temuan Suhardi dan Raffiudin (2023) menegaskan bahwa kenyataannya kebijakan ini dijadikan sebagai sebuah peluang atau kesempatan bagi orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu untuk mengambil sebuah keuntungan

atau bertujuan untuk memanfaatkan kepentingan publik menjadi kepentingan bagi sekelompok orang saja.

Hal ini diperkuat dengan temuan Firmansyah (2016) yang menjelaskan bahwa dari kebijakan reklamasi pantai ini hanya bisa dirasakan oleh kalangan orang yang memiliki finansial ke atas atau orang kaya, pada kenyataannya reklamasi pantai ini menimbulkan adanya kesenjangan sosial dan menciptakan kelas-kelas sosial saja karena perumahan yang ada di reklamasi pantai ini umumnya hanya dimiliki oleh kalangan kelas sosial ke atas saja. Hal ini disebabkan tingginya harga perumahan atau tempat tinggal yang ada di reklamasi pantai maka dari itu yang mempunyai tempat tinggal di pulau reklamasi ini hanya orang kaya saja, selain dijadikan perumahan-perumahan elite yang hanya dimiliki oleh kalangan sosial atas kawasan ini juga dijadikan kawasan ekonomi yang dimiliki oleh kalangan borjuis.

Kawasan yang menjadi perhatian masyarakat luas karena menimbulkan polemik adalah pusat wisata yang berada di Utara Jakarta yaitu Pantai Indah Kapuk 2. Tempat ini kerap kali menjadi destinasi masyarakat Jakarta untuk melepaskan penat, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) memiliki bermacam-macam destinasi untuk dikunjungi seperti pusat makanan dan hiburan. Selain menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjunginya, kawasan ini juga menjadi kawasan elite yang memiliki perkantoran dan properti mewah di area Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Namun, dibalik megahnya pembangunan pusat wisata dan properti ini memiliki tembok tinggi yang dimana tembok ini memiliki tujuan untuk membatasi perkampungan dengan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Berdasarkan pantauan

Katadata, “pengembang PIK 2 membangun tembok setinggi 5 meter yang membatasi perumahan elite dengan warga asli Desa Muara, Desa Limo dan sebagian Desa Salembaran. Tembok tinggi sepanjang 6 km tersebut menyebabkan akses jalan tikus yang biasa digunakan warga menjadi tertutup”. Dampak yang ditimbulkan dari proyek pembangunan ini memberikan dampak yang berkaitan dengan aspek sosial, pembangunan ini juga menimbulkan dampak ekonomi dan lingkungan terhadap lingkungan yang ada di sekitar PIK 2.

Daerah yang merasakan Implikasi sosial dan ekonomi terhadap proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) adalah Kecamatan Teluknaga, proyek ini berdiri diatas lahan yang menghimpit tiga desa di Kecamatan Teluknaga yang berada di Kecamatan Tangerang yaitu Desa Muara, Desa Lemo, dan Desa Salembaran. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan ini menyebabkan warga di Kecamatan Teluknaga menjadi merasakan daerahnya menjadi banjir, warga menjadi kehilangan akses jalan, bahkan ada warga dari kecamatan ini yang bekerja sebagai nelayan harus sampai kehilangan pekerjaannya akibat dari pembangunan proyek ini (Zahira, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih dalam mengenai implikasi sosial dan ekonomi dari kebijakan reklamasi pantai di PIK 2 terhadap kehidupan masyarakat sekitar, serta bagaimana peran pemerintah melalui perspektif masyarakat dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang benar-benar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dampak pembangunan proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK 2) terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Teluknaga?
2. Dalam pelaksanaan proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK 2), apakah menjunjung tinggi konsep pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Kecamatan Teluknaga?

1.3 Tujuan Penelitian

Meninjau dari permasalahan yang ada terkait proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembangunan ini terhadap masyarakat di Kecamatan Teluknaga. Selain itu juga, penelitian ini akan menilai kesesuaian kebijakan reklamasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil temuan yang ada pada masyarakat terdampak di Kecamatan Teluknaga.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini pun juga diharapkan agar dapat memberikan manfaat serta ilmu dan pengetahuan kepada para pembaca, lalu memberikan sebuah pemecahan masalah tersebut secara praktis melalui penelitian yang telah dilakukan:

a. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para pembaca terkait proses reklamasi pantai, serta pemahaman akan dampak yang diberikan dari proyek reklamasi pantai terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar proyek reklamasi pantai ini. Selain itu

juga, dengan adanya penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan memberikan data dan analisis yang lebih kuat kepada para pembuat kebijakan, kedepannya diharapkan agar penelitian ini dapat membantu para pembuat kebijakan agar bisa menentukan sebuah keputusan lebih baik lagi. Kemudian juga, diharapkan dapat membantu dalam mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari kebijakan reklamasi pantai, hal ini agar pemerintah kedepannya lebih bisa memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak kerugian bagi masyarakat. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memecahkan atau mengatasi masalah yang ada.

1.5 Literature Review

Dalam melakukan sebuah penelitian terhadap suatu kasus tentunya tidak ada yang benar-benar baru atau memang sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian terlebih dahulu. Literature review sendiri memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman terkait masalah yang dibahas lalu akan dirumuskan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan informasi dari tulisan-tulisan terdahulu yang sesuai dengan topik yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

Salah satu penelitian yang membahas tentang kebijakan reklamasi pantai, tulisan yang pertama merupakan Sebuah jurnal TATA LOKA, November 2019 yang ditulis oleh Insan Harapan Harahap dan Nana Suryana, program studi Ilmu

Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bakrie. Penulis menjelaskan polemik yang muncul terkait kebijakan reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta yang tidak ada ujungnya. Hal ini karena kebijakan reklamasi dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, kebijakan tersebut pun juga menjadi arena pertarungan antara penguasa dan pengusaha, tidak hanya itu kasus suap dan korupsi hadir menyelimuti kebijakan reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta. Atas dasar itu, peneliti mencoba untuk meneliti tentang bagaimana urgensi kebijakan reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan dampak yang akan ditimbulkan, selain itu penelitian ini mencoba untuk menjelaskan siapa saja aktor yang memiliki kepentingan dalam proyek reklamasi ini. Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen dan wawancara kepada institusi terkait yang memiliki korelasi dengan kebijakan reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proyek reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta menyebabkan dampak negatif dan positif. Peneliti terdahulu dengan peneliti dalam penelitian ini memiliki persamaan yang mana juga menjelaskan bahwa proyek ini tidak hanya dapat memecahkan masalah yang ada saja tetapi justru menimbulkan permasalahan yang baru karena adanya dampak buruk yang ditimbulkan terhadap lingkungan, selain itu juga menjelaskan regulasi yang mengatur kebijakan reklamasi pantai. Selain itu juga memiliki persamaan terkait tipe penelitian dan dalam teknik pengumpulan data.

Berikutnya ada penelitian jurnal yang berkaitan dengan reklamasi pantai, Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh data yang konkret mengenai dampak proyek pembangunan reklamasi pantai Ancol di Jakarta Utara terhadap

kelangsungan ekosistem pesisir dan lautnya. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat dampak yang signifikan terhadap dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari proyek pembangunan reklamasi pantai Ancol ini. Dalam penelitian ini ditinjau melalui antropologi pembangunan menunjukkan bahwa proyek reklamasi pantai Ancol sepenuhnya tidak menimbulkan dampak yang negatif justru berdampak positif sebab akan menambahnya jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak. Karena diketahui bahwa daratan yang dijadikan pembangunan reklamasi ini akan disulap menjadi tempat wisata yang indah dan eksklusif dengan berbagai manfaat lainnya. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, yakni adanya penjelasan terkait kebijakan reklamasi pantai yang mana menjelaskan tentang dampak ekologi, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan. Selain itu juga, adanya perbedaan yang ada yakni peneliti saat ini lebih fokus menganalisis dan meneliti pada satu daerah dan adanya penjelasan terkait regulasi yang mengatur kebijakan reklamasi pantai, kemudian tidak adanya penjelasan kerangka hukum maupun regulasi yang mengatur terkait kebijakan Reklamasi Pantai.

Terdapat pula penelitian yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan agar dapat memberi pemahaman terkait pentingnya sebuah pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan karena melalui hal ini kita dapat memastikan bahwa lingkungan hidup dan sumber daya yang dibutuhkan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang tetap terjaga. Pembangunan

berkelanjutan menurut Emil Salim (1990) menjelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat luas, tidak hanya itu hal ini juga diharapkan menjadikan pembangunan antar generasi lebih merata. Selain itu juga ada, pendapat dari KLH (1990) menjelaskan bahwa Pembangunan yang dasarnya berorientasi pada ekonomi dapat diukur sustainability -nya berprinsipkan tiga standar, yaitu menghemat pemanfaatan sumber daya alam, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan menitikberatkan pembangunan berkelanjutan serta dapat sumber daya yang tergantikan. Memang sudah seharusnya dalam suatu pembangunan sendiri harus menilai dan menimbang apakah pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih banyak atau justru sebaliknya memberikan dampak kerugian bagi sekitar pembangunan tersebut. Namun, berdasarkan kasus yang diteliti terkait Reklamasi PIK 2 berpotensi memberikan dampak yang buruk bagi keberlanjutan pembangunan sebuah daerah karena adanya dampak sosial, dampak ekonomi serta dampak bagi ekosistem dan lingkungan hidup yang ditimbulkan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Reklamasi Pantai terhadap Perubahan Sosial-ekonomi

Dalam melakukan penelitian terkait reklamasi sangat penting untuk memahami suatu permasalahan dan dibutuhkannya suatu pendekatan terhadap masalah tersebut, pendekatan ini diperoleh melalui pemahaman mengenai pengertian, tujuan, serta dampak dari reklamasi.

Adapun pengertian reklamasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang didefinisikan sebagai pengerukan (tanah), atau juga upaya memperluas lahan atau dengan menjadikan sebuah daerah yang sebelumnya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, sedangkan mereklamasi memiliki arti melebarkan lahan dengan membuka tanah untuk digarap. Selaras dengan definisinya, reklamasi memiliki tujuan utama yakni merealisasikan kawasan berair yang tidak berguna atau kurang memberikan hasil menjadi lebih bermanfaat.

Dengan demikian, reklamasi merupakan sebuah kegiatan atau usaha pembentukan lahan baru dengan cara pengeringan lahan atau drainase, pengurugan demi meningkatkan nilai guna sebuah lahan yang tidak terpakai. Sedangkan reklamasi pantai dapat didefinisikan sebagai upaya pembuatan lahan baru baik yang terpisah dari pantai dengan cara mengurug, mengeringkan lahan atau drainase ataupun yang sudah menyatu dengan wilayah pantai dalam rangka meningkatkan nilai guna lahan yang ditinjau dari sudut sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan.

Tujuan reklamasi sendiri merupakan upaya untuk memanfaatkan atau menambah nilai guna kawasan yang tidak berguna menjadi kawasan yang

bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi daerah tersebut. Khususnya kota Jakarta, tujuan utama reklamasi Pantai Utara Jakarta yakni mengatasi masalah akan keterbutuhan lahan akibat pesatnya laju pertumbuhan penduduk yang ada di kota Jakarta. Dari permasalahan yang ada mendorong pemerintah untuk memperluas wilayah guna mengembangkan kota Jakarta yang dimana tempat tersebut akan dijadikan pemukiman yang dapat menampung sekitar 1,5 juta penduduk Jakarta.

Pada umumnya kebijakan reklamasi ini diterapkan di berbagai negara maupun di kota-kota besar yang memiliki masalah akan keterbutuhan lahan akibat tingginya laju pertumbuhan pada daerah tersebut sehingga lahan daratan pun semakin menyempit. Dengan keadaan tersebut, sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran daerah ke arah daratan lagi sehingga dibutuhkannya pembentukan daratan yang baru.

Menurut Diposaptono (2016) menjelaskan bahwa sekalipun reklamasi di wilayah pantai merupakan solusi untuk menanggulangi persoalan terkait keterbutuhan lahan di masa depan, tetapi tentunya hanya beberapa wilayah pesisir atau pantai saja yang layak di reklamasi. Sebelum diberlakukannya reklamasi perlu memperhatikan berbagai faktor seperti daya dukung terhadap lingkungan sekitar serta memperhatikan rencana zonasi atau tata ruang laut yang tepat untuk dijadikan lokasi reklamasi serta bisa menjaga keterjaminan penghidupan dan kehidupan nelayan.

Berdasarkan diterapkannya kebijakan reklamasi pantai diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan akan keterbatasan lahan saja, tetapi juga

harus memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini terhadap masyarakat yang ada di sekitar dan ekosistem.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya reklamasi ini bukan hanya bersifat lokal saja tetapi juga meluas. Reklamasi pantai pun pastinya juga memiliki dampak yang positif akan tetapi juga memiliki dampak negatif yang bisa berpengaruh terhadap masyarakat dan ekosistem laut, lalu dari dampak yang ditimbulkan juga pun mempunyai sifat sementara dan berkelanjutan akan masyarakat sekitar pesisir dan kondisi ekosistem yang ada. Dengan adanya hal tersebut, menuntut pemerintah daerah maupun pusat harus bertindak secara bijaksana dan adil dalam merumuskan sebuah kebijakan, kemudian juga harus mempertimbangkan konsekuensi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut agar dampak yang ditimbulkan pun dapat diminimalisir.

Sesuai dengan tujuan diadakannya reklamasi, secara umum dampak positif dari reklamasi ialah membuka kesempatan agar terlaksananya pembangunan di wilayah pesisir, adanya peluang untuk membangkitkan kembali transportasi air, memajukan pariwisata bahari, serta meningkatkan taraf pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dari adanya pariwisata (Mustaqim, 2015).

Pertumbuhan ekonomi wilayah pun menjadi salah satu aspek utama yang mengalami perubahan secara signifikan. Lantaran dengan hadirnya PIK 2 telah menciptakan pusat aktivitas ekonomi baru di wilayah Jakarta Utara, ditandai dengan munculnya berbagai kegiatan komersial dan bisnis. Kawasan ini akan

menjadi pusat kekuatan ekonomi yang memiliki daya tarik yang kuat bagi investor baik domestik maupun internasional untuk menanamkan modalnya.

Dengan adanya kegiatan reklamasi tentunya juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai sumber pajak yang didapatkan melalui PIK 2 seperti pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hiburan, serta retribusi lainnya. Adanya peningkatan ini memberikan tambahan anggaran bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan layanan publik serta infrastruktur daerah yang semakin terintegrasi.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari reklamasi pantai bagi kehidupan sosial yakni yang awalnya wilayah pantai merupakan ruang publik bagi masyarakat, setelah adanya kegiatan ini ruang ini pun dijadikan atau dimanfaatkan untuk kegiatan privat pada akhirnya pun juga dapat menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan sosial bagi masyarakat sekitar daerah tersebut.

Di sisi lain, kegiatan ini juga berdampak pada aspek ekonomi masyarakat dikarenakan hal ini berdampak pada mata pencaharian mereka. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat yang ada di wilayah pesisir pantai merupakan nelayan dan petani tambak, dengan adanya reklamasi ini merubah wilayah tangkapan mereka karena sudah menjadi daratan (pulau) sehingga hasil tangkapan mereka pun jadi berkurang dan berimbas pada turunnya pendapatan mereka. Oleh karena itu, demi meminimalisir dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut membutuhkan sebuah rasional komprehensif sebelum diterapkannya sebuah kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut

memang tepat. Dalam mencapai pendekatan tersebut diperlukannya beberapa kriteria yang harus dipenuhi, Menurut Dunn (2013:429) rekomendasi kebijakan yang baik harus memenuhi enam kriteria utama yang digunakan untuk mengevaluasi dan menyarankan solusi dalam memecahkan permasalahan kebijakan, berikut ini merupakan beberapa kriteria yakni:

1. Efektivitas.

Efektivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Hal ini mempertanyakan apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar mampu memecahkan masalah yang menjadi dasar pembuatannya.

2. Efisiensi.

Efisiensi menilai sejauh mana hasil kebijakan dicapai dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Kriteria ini berfokus pada perbandingan antara sumber daya yang telah dikorbankan dengan manfaat yang diperoleh. Kebijakan yang efisien adalah kebijakan yang memberikan hasil maksimal dengan pengorbanan yang minimal.

3. Kecukupan

Kecukupan menilai seberapa jauh suatu kebijakan sudah memenuhi kebutuhan dan kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dilaksanakan dengan benar untuk mengatasi masalah yang ingin diselesaikan.

4. Perataan.

Perataan menilai bagaimana kebijakan mendistribusikan manfaat dan beban di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini menekankan pada aspek keadilan, memastikan bahwa suatu kebijakan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu tetapi juga memberikan manfaat yang merata kepada semua pihak.

5. Responsivitas.

Responsivitas menilai seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan kelompok dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui respon masyarakat baik sebelum maupun sesudah diterapkannya sebuah kebijakan.

6. Ketepatan

Ketepatan merupakan kriteria yang erat kaitannya dengan rasionalitas substantif. Penilaian terhadap ketepatan kebijakan tidak hanya didasarkan pada satu kriteria saja, tetapi melibatkan gabungan dari dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Ketepatan mencerminkan nilai atau pentingnya tujuan-tujuan program serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuan tersebut.

1.6.2 Perubahan Sosial-Ekonomi

1.6.2.1 Konsep Perubahan Sosial-Ekonomi

Pada setiap perencanaan, diperlukan adanya strategi dan pemahaman dari faktor sosial yang berada di sekitar lingkungan itu sendiri. Aspek sosial juga turut menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, mengingat masyarakat sebagai konstituen negara dapat menilai dan juga melakukan

monitoring. Tetapi di dalam implementasinya, diskusi perubahan sosial-ekonomi kerap sangat berkaitan dengan aspek perencanaan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan dan perkembangan dari suatu era. Menurut Soekanto (1983), perubahan adalah tanda yang muncul dalam setiap masyarakat karena tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan pola-pola yang sudah ada. Sedangkan pada perubahan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses berkelanjutan di dalam masyarakat di mana, dari periode ke periode, terjadi transformasi meskipun bersifat sekecil apa pun (Lumintang, 2015). Berbagai perubahan yang terjadi pada aspek sosial-ekonomi selalu bertumpu pada aspek sosial itu sendiri. Ini mengapa, sistem sosial menjadi hal yang sangat penting untuk dapat diperhatikan.

Perubahan ekonomi yang juga menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi sistem sosial saling berkaitan melihat dari kondisi masyarakat. Pendekatan melalui analisis sistem sosial dapat membuka berbagai komponen sosial yang sejalan dengan konsep ekonomi. Menurut Marimin (2007), sistem sosial mengedepankan interaksi antar aktor yang melibatkan tujuan dan berbagai komponen sosial di dalamnya. Karl Marx dikenal dengan konsep materialisme historis, yang di mana pandangannya menempatkan struktur ekonomi sebagai titik awal dari aktivitas manusia. Menurutny, struktur ekonomi menjadi pendorong sistem sosial yang mengakibatkan perubahan sosial, dengan lingkungan ekonomi menjadi dasar dari semua perilaku manusia. Hal ini diperkuat juga yang menyatakan bahwa

masyarakat dapat dibagi menjadi infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur mencakup struktur ekonomi, sementara suprastruktur melibatkan ideologi, hukum, pemerintahan, keluarga, dan agama. Struktur ekonomi dianggap sebagai dasar yang membangun seluruh kekuatan lainnya. Oleh karena itu, perubahan dalam cara produksi dapat mengakibatkan perubahan dalam semua hubungan sosial manusia. Proses produksi ini terjadi dalam konteks perkembangan masyarakat industri, di mana terlibat dua kelas yang saling bertentangan, yaitu kelas borjuis dan proletar. Konflik kelas atau kontradiksi dapat menghasilkan perubahan sosial, dan hasil ekstrem dari kontradiksi tersebut adalah revolusi. Secara mendasar, perubahan mempengaruhi pola perilaku sosial dan ekonomi masyarakat. Pola perilaku, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi, akan mengikuti arus perubahan yang terjadi. Begitu pula pada sistem sosial yang terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Teluknaga. Keterlibatan masyarakat dalam menanggapi kasus reklamasi sejalan dengan teori perubahan sosial-ekonomi yang menjadi dasar pemikiran dampak yang terjadi terhadap masyarakat sekitar.

Dalam konteks perubahan sosial-ekonomi yang terjadi akibat Pembangunan reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 di Kecamatan Teluknaga telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh proyek reklamasi sering kali menciptakan ketegangan antara kepentingan pembangunan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Sebagai contoh, penelitian oleh Mahendra dan Purwanti menunjukkan bahwa reklamasi dapat mengakibatkan

penurunan hasil tangkapan nelayan, yang merupakan sumber utama mata pencaharian mereka (Mahendra & Purwanti, 2023). Selain itu, konflik lahan dan ketidakpuasan sosial sering kali muncul sebagai akibat dari proyek-proyek besar seperti ini, yang dapat mengakibatkan pergeseran budaya dan perubahan mata pencaharian masyarakat (Harahap & Suryana, 2019). Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa reklamasi dapat mengganggu aktivitas ekonomi tradisional, seperti perikanan, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir (Djamil et al., 2022).

Dalam hal kesejahteraan masyarakat, akses terhadap tempat mata pencaharian serta mobilitas sosial juga menjadi perhatian utama. Penelitian menunjukkan bahwa proyek reklamasi sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur sosial yang memadai, sehingga masyarakat tetap kesulitan dalam mengakses layanan dasar (Fajar, 2023).

Perubahan pendapatan per kapita masyarakat di Kecamatan Teluknaga juga perlu dianalisis. Reklamasi yang tidak terencana dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, di mana sebagian kecil masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan, sementara yang lain justru terpinggirkan (Srianti, 2018). Penelitian oleh Widiatmoko menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari proyek-proyek pembangunan sering kali tidak merata, dan masyarakat yang paling terdampak sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang adil (Fajar, 2023).

1.6.2.2 Faktor Penyebab Perubahan Sosial-Ekonomi

Sosial ekonomi merujuk pada status atau posisi seseorang dalam suatu kelompok masyarakat yang ditentukan oleh berbagai faktor seperti jenis kegiatan ekonomi, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis tempat tinggal, dan kekayaan yang dimiliki (Abdulsyani, 1994). Pembahasan mengenai sosio-ekonomi juga kerap berkaitan dengan beberapa konsepsi dasar, seperti: pendidikan, status sosial, pendapatan, dan alokasi pendapatan. Melihat urgensi dari penelitian ini, peneliti menggunakan teori ini untuk mencoba menganalisis dampak yang secara signifikan dapat terjadi. terdapat juga beberapa aspek penting yang mendorong maupun menghambat perubahan sosial menurut Soekanto (2006), seperti:

- Faktor-faktor yang mempercepat proses perubahan sosial melibatkan: kontak dengan budaya lain, kemajuan dalam sistem pendidikan formal, sikap positif terhadap pencapaian individu dan keinginan untuk kemajuan, toleransi terhadap perilaku yang tidak konvensional, struktur masyarakat yang bersifat terbuka, keberagaman penduduk, ketidakpuasan terhadap aspek-aspek tertentu dalam kehidupan, orientasi ke masa depan, dan keyakinan bahwa manusia harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- Faktor-faktor yang melambatkan proses perubahan sosial melibatkan: kurangnya interaksi dengan masyarakat lain, kemajuan ilmu pengetahuan yang lambat, keterikatan kuat pada tradisi oleh masyarakat, keberadaan kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat atau vested interest, ketakutan terhadap risiko disintegrasi

kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, serta sikap yang tertutup, hambatan-hambatan ideologis, adat atau kebiasaan, dan pandangan bahwa hakikat hidup ini negatif dan sulit untuk diperbaiki.

Berbagai faktor perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilihat dari tujuan suatu sistem sosial yang terbentuk. Pada hakikatnya, tidak lengkap rasanya jika sistem sosial bertumpu hanya pada ketergantungan satu sama lain. Perubahan sosial-ekonomi berkembang sangat luas sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang lebih mendalam terhadap analisis peran masyarakat menghadapi suatu masyarakat.

1.6.3 Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan ini juga terdapat dalam literature review yang mana didukung oleh teori dari (Emil Salim, 1990) memiliki tujuan guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun menurut KLH (1990), konsep pembangunan berkelanjutan dapat diukur melalui tiga standar yaitu menghemat penggunaan sumber daya alam, tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, serta menitikberatkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam teori yang dipaparkan di atas menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan diharapkan lebih memperhatikan apa saja yang dibutuhkan serta kebutuhan, tidak hanya itu pembangunan berkelanjutan juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Disamping itu, pembangunan berkelanjutan juga harus lebih mengutamakan serta memperhatikan ekologi

pembangunan. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan dimaksudkan agar pembangunan antar generasi saat ini maupun masa yang akan datang menjadi lebih merata.

Senada dengan konsep diatas, Io (2010) dalam Ta dan Rusmiwari (2019) menjelaskan bahwa keberlanjutan merupakan suatu pembangunan yang harus melengkapi kebutuhan kehidupan sekarang tanpa harus menimbulkan dampak bagi generasi yang akan datang. Meskipun risiko yang disebabkan dari pembangunan sekarang tidak sepenuhnya dilimpahkan terhadap kehidupan yang akan datang, namun risiko tersebut harus diperhitungkan secara rasional bagi kehidupan sekarang maupun yang akan datang.

Diakui bahwa meskipun konsep keberlanjutan bersifat sederhana, namun kompleks, sehingga interpretasi dan pemahaman tentang keberlanjutan sangatlah beragam dan multidimensional. Menurut Fauzi (2004), konsep berkelanjutan mengandung dua unsur dimensi: pertama adalah dimensi waktu, yang dimana keberlanjutan sangat berkaitan dengan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang; kedua adalah dimensi interaksi, yang dimana melihat interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Harris (2000) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, (1) keberlanjutan ekonomi, secara kontinu dan menghindari ketidakseimbangan sektoral, (2) keberlanjutan lingkungan, yang harus memelihara sumber daya secara stabil dan menghindari aktivitas eksploitasi. (3) keberlanjutan sosial, yang dapat diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai prinsip kesetaraan dan keberlanjutan. Strategi yang kerap ditawarkan juga

berlandaskan pada empat komponen yang perlu diperhatikan, yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, Integrasi, dan perspektif jangka Panjang.

Dari teori diatas dapat dikonseptualisasikan terhadap topik penelitian peneliti bahwa setiap pembangunan yang dilakukan harus berpedoman sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan terutama di daerah pesisir, yang mana konsep ini dimaksudkan meskipun terjadinya sebuah pembangunan diharapkan lebih memperhatikan kesejahteraan serta kebutuhannya menjadi tercukupi, dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Di sisi lain, pembangunan juga harus lebih memprioritaskan dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan di pesisir pantai. Selain itu, dengan adanya pembangunan lebih memperhitungkan serta memperhatikan risiko yang disebabkan agar nantinya diharapkan agar generasi yang akan datang tidak dirugikan. Namun, dalam pembangunan berkelanjutan sendiri membutuhkan sebuah strategi demi tercapainya dan memudahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, demi terjadinya sebuah pembangunan yang berkelanjutan bagi sekitar dan ekosistemnya diperlukan sebuah evaluasi implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Lebih lanjut, evaluasi implementasi kebijakan reklamasi akan mencakup kepatuhan terhadap regulasi lingkungan untuk mengidentifikasi sejauh mana proyek reklamasi telah mematuhi peraturan yang berlaku, terutama dalam mencegah dampak negatif terhadap ekosistem pesisir. Mengingat bahwa beberapa proyek reklamasi di Indonesia, termasuk di wilayah Jakarta, sering kali

dikritisi karena kurangnya kepatuhan terhadap standar lingkungan, aspek ini menjadi sangat krusial agar dampak negatif jangka panjang dapat dihindari (Djamil et al., 2022; Mahendra & Purwanti, 2023; Arzikah, 2023).

Selanjutnya, evaluasi juga akan mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam proses reklamasi. Menurut penelitian yang ada, keterlibatan masyarakat, terutama mereka yang terdampak secara langsung, dapat mendorong penerimaan sosial yang lebih baik terhadap proyek ini, di mana para nelayan dan komunitas pesisir lainnya diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek (Sugiarta & Widiati, 2020; Andi et al., 2017).

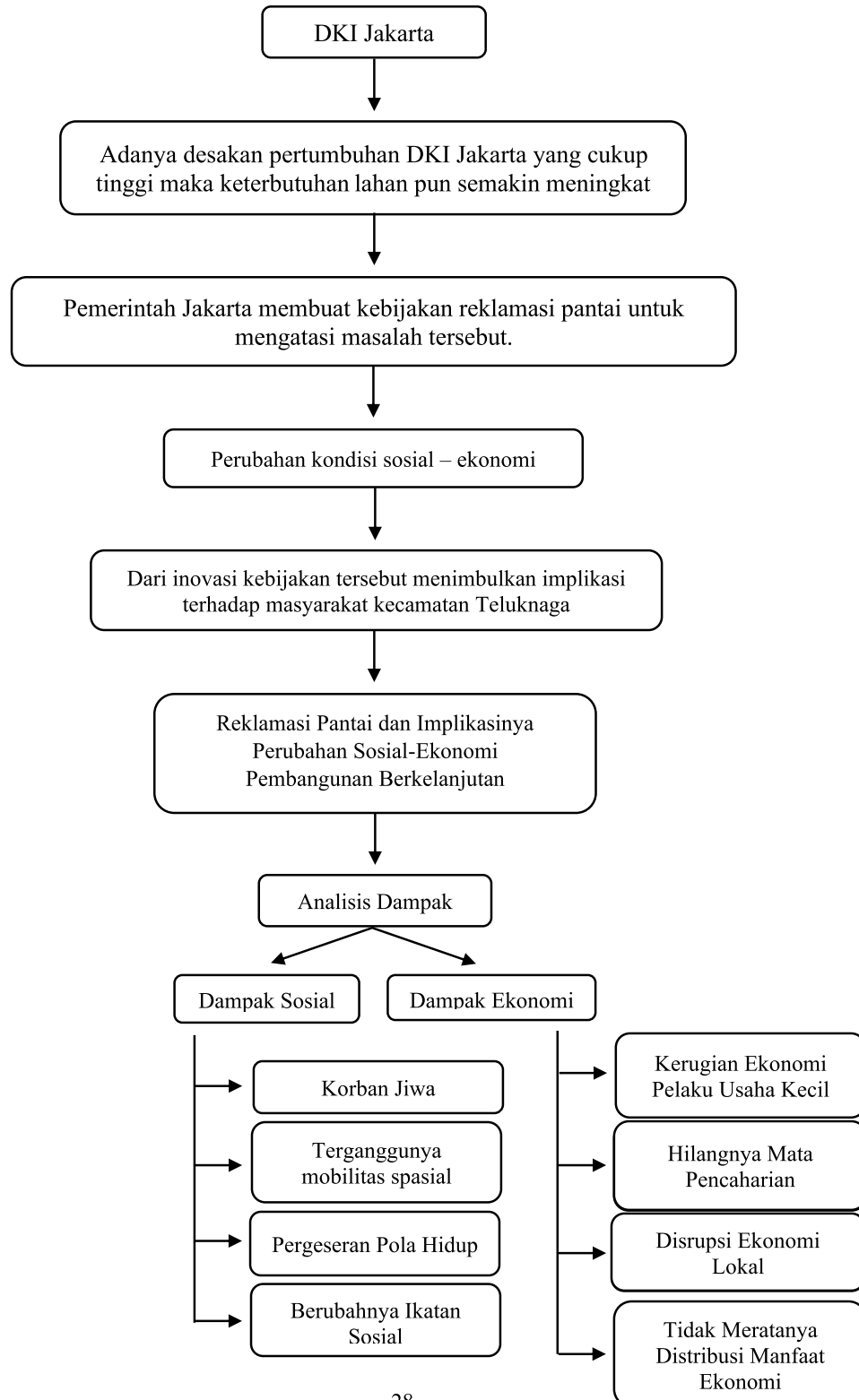
Evaluasi implementasi kebijakan reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 merupakan aspek penting dalam memahami kepatuhan pembuat kebijakan terhadap regulasi dan standar lingkungan hidup. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, reklamasi harus dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang efisien, dan minimisasi dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa reklamasi di kawasan Pantai Indah Kapuk telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, yang berperan dalam pengembangan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang berkelanjutan (Marsella, 2024; Sampurna & Chou, 2021).

Salah satu tantangan utama dalam evaluasi kebijakan reklamasi adalah memastikan bahwa semua aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi diperhitungkan. Penelitian oleh Mahendra dan Purwanti Mahendra & Purwanti (2023) menekankan pentingnya mitigasi dampak negatif dari proyek reklamasi

dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan implementasi. Selain itu, penelitian oleh Royandi (2019) menunjukkan bahwa terdapat konflik kepentingan antara pihak swasta dan masyarakat lokal, yang sering kali mengakibatkan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat terhadap kebijakan yang diambil. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dengan baik.

Dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi, evaluasi terhadap kebijakan reklamasi juga harus mencakup analisis terhadap efektivitas implementasi peraturan yang ada. Penelitian oleh Tjahyana & Epifania (2019) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang seringkali terabaikan dalam proyek-proyek reklamasi, dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan terhadap ekosistem.

1.7 Kerangka Berpikir



DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia menghadapi tantangan yang besar terkait pertumbuhan penduduk yang pesat dan kebutuhan lahan yang semakin meningkat. Seiring berjalannya pertumbuhan kota yang tinggi ini mengakibatkan tekanan yang signifikan terhadap ketersediaan lahan, sehingga pemerintah daerah pun harus mencari solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan lahan, Pemerintah DKI Jakarta mengambil langkah berani dengan menerapkan kebijakan reklamasi pantai. Reklamasi ini dimaksudkan sebagai solusi untuk memperluas wilayah kota dan menciptakan ruang baru bagi pembangunan infrastruktur dan pemukiman. Namun, seperti halnya setiap kebijakan besar, reklamasi pantai ini membawa konsekuensi yang tidak terduga, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar area reklamasi.

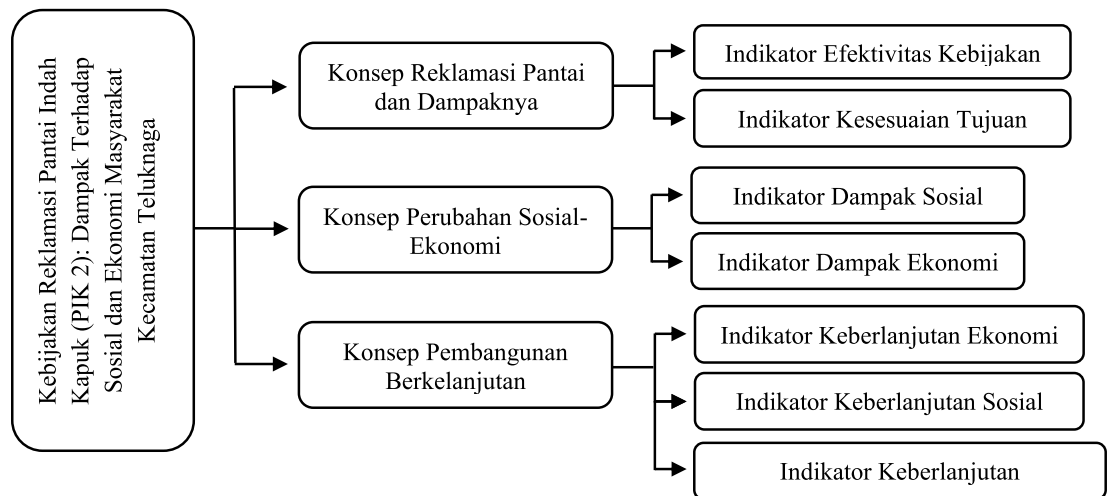
Demi memahami dampak dari kebijakan reklamasi ini, perlu dilakukan analisis mendalam dengan menggunakan kerangka teori yang relevan. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama: konsep reklamasi pantai serta implikasinya, dan teori perubahan sosial-ekonomi. Dengan menggabungkan kedua aspek ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana reklamasi pantai mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Melalui kajian teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari berbagai perubahan yang terjadi dalam baik struktur sosial maupun ekonomi masyarakat Kecamatan Teluknaga. Adanya pembangunan reklamasi ini

telah menghasilkan transformasi signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Teluknaga, wilayah pesisir yang sebelumnya menjadi basis kehidupan para nelayan tradisional kini harus berubah menjadi kawasan yang komersial dan perumahan elite sehingga memaksa komunitas nelayan untuk menghadapi perubahan fundamental.

Dampak sosial yang paling nyata adalah perubahan struktur sosial yang mana terputusnya ikatan sosial tradisional, para nelayan yang terpaksa beralih profesi atau harus melakukan migrasi untuk mencari wilayah tangkapan baru karena hilangnya wilayah untuk menangkap ikan, serta terganggunya mobilitas spasial masyarakat Kecamatan Teluknaga. Sedangkan, secara ekonomi reklamasi ini telah menimbulkan penurunan drastis terhadap pendapatan masyarakat dimana nelayan kehilangan mata pencaharian utama mereka dan mengalami kesulitan dalam melakukan transisi ekonomi. Secara tidak langsung perubahan ini tidak hanya sekedar perpindahan geografis saja, melainkan juga rekonfigurasi menyeluruh terhadap sistem sosial dan ekonomi penduduk Kecamatan Teluknaga yang telah ada dan turun temurun.

1.8 Operasionalisasi Konsep



1.8.1 Konsep Reklamasi Pantai dan Implikasinya.

Dalam penelitian ini ada konsep utama yang perlu dioperasionalkan yakni mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan. Pada konsep yang pertama ini akan membahas pencapaian keberlanjutan sosial-ekonomi sebagai tolak ukur utama. Hal ini mencakup sejauh mana reklamasi dapat menciptakan peluang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan baru dan peningkatan pendapatan lokal, yang tidak hanya terjadi pada fase awal pembangunan tetapi juga dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana reklamasi berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat pesisir serta kesejahteraan sosial mereka, dengan menyoroti pentingnya akses terhadap lahan yang baru dibangun bagi penduduk lokal untuk kegiatan komersial dan rekreasi.

Dengan demikian, teori reklamasi ini akan diimplementasikan sebagai landasan analisis untuk mengevaluasi kebijakan melalui respon dari masyarakat melalui beberapa indikator, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam konteks ini, pembangunan yang diinisiasi oleh aparat pemerintah seharusnya menjamin bahwa dampak kebijakan dapat teraktualisasi secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas pada segmen populasi dengan kapabilitas finansial yang superior.

1.8.2 Konsep Perubahan Sosial - Ekonomi

Pada konsep yang kedua ini menjelaskan perubahan sosial-ekonomi yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Teluknaga akibat dari berlangsungnya pembangunan Reklamasi Pantai Indah Kapuk 2. Dalam konsep ini memiliki sebuah indikator yang mana sebagai berikut, yakni melakukan wawancara langsung terhadap penduduk lokal untuk mengetahui dampak sosial seperti perubahan mata pencaharian serta terganggunya mobilitas sosial masyarakat di Kecamatan Teluknaga. Sedangkan, dampak ekonomi ialah hilangnya mata pencaharian dan turunnya pendapatan masyarakat yang bekerja dengan menggantungkan pendapatan mereka dari sumber daya alam setempat seperti petani dan nelayan. Dalam konteks perubahan sosial-ekonomi yang terjadi akibat Pembangunan reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 di Kecamatan Teluknaga telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan operasionalisasi konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan dua indikator utama dalam

mengukur dampak pembangunan Reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 terhadap masyarakat Kecamatan Teluknaga. Dengan teori ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara keseluruhan terkait dampak sosial-ekonomi yang disebabkan oleh reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 di Kecamatan Teluknaga, serta menjadi kerangka yang sistematis dalam menganalisis sejauh mana kebijakan reklamasi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitarnya.

1.8.3 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pada konsep ini dimaksudkan meskipun terjadinya sebuah pembangunan diharapkan lebih memperhatikan kesejahteraan serta kebutuhannya menjadi tercukupi, dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan sendiri dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Pertama dari indikator keberlanjutan ekonomi, dapat dilihat bahwa proyek reklamasi PIK 2 merupakan salah satu proyek pengembangan kawasan yang membawa konsekuensi besar terhadap sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya, khususnya kecamatan Teluknaga. Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), hal ini perlu dikaji dengan aspek keberlanjutan ekonomi dengan beberapa parameter yakni Pertumbuhan Ekonomi Lokal, Distribusi Kesejahteraan, dan Keberlanjutan Mata Pencaharian.

Kemudian, Indikator kedua ialah keberlanjutan sosial. Ketika membahas terkait konsep pembangunan yang memperhatikan masa depan, komponen sosial merupakan elemen krusial yang tidak bisa diabaikan untuk menjamin

kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang. Demi memahami sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari proyek reklamasi PIK 2, diperlukan pengukuran yang terukur dan sistematis terhadap dinamika perubahan dalam kehidupan warga setempat. Dalam indikator ini dapat diukur dengan beberapa parameter, yakni keadilan sosial dan hak komunitas lokal, partisipasi dan keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan budaya lokal.

Terakhir, indikator yang ketiga adalah keberlanjutan. Kebijakan ini memberikan dampak yang signifikan tidak hanya pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Teluknaga. Oleh karena itu, diperlukan indikator penelitian yang komprehensif untuk mengukur dan memahami dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kebijakan reklamasi ini, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah mitigasi yang efektif. Dalam indikator ini dapat diukur dengan beberapa parameter, yakni keseimbangan ekosistem pesisir, kualitas udara, dan mitigasi dampak lingkungan.

1.9 Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menerapkan serangkaian metode yang terstruktur dan sistematis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Pemilihan metode penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang sebagai suatu pendekatan ilmiah yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui penerapan metode yang cermat dan tervalidasi secara akademis, penelitian ini dirancang untuk memenuhi standar keilmuan yang tinggi. Hal ini memungkinkan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik

dari segi proses pengumpulan data, analisis, maupun penarikan kesimpulan. Dengan demikian, karya ilmiah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kaidah-kaidah penelitian yang baku, tetapi juga memberikan kontribusi yang bermakna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang diteliti.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji secara mendalam mengenai implementasi kebijakan reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK 2) serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Teluknaga. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang holistik dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti, dimana peneliti dapat menggali informasi secara natural dan mendalam dari para informan yang terlibat langsung dalam proses reklamasi maupun masyarakat yang terdampak. Melalui metode deskriptif, peneliti berupaya untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai berbagai fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang ditemukan di lapangan terkait dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan reklamasi tersebut serta.

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memaparkan secara detail berbagai temuan empiris mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat, pola mata pencaharian, tingkat pendapatan, serta berbagai aspek kehidupan lainnya yang terpengaruh oleh adanya proyek reklamasi PIK 2. Metode penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan intensif yang dimana peneliti ikut berpartisipasi dan

mencatat sebuah fenomena yang terjadi di dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Teluknaga, kemudian juga melakukan analisis reflektif terhadap berbagai kejadian yang ditemukan di tempat kejadian serta membuat laporan penelitian terkait permasalahan yang terjadi.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini dimaksudkan untuk memberi peneliti kesempatan untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dengan menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas situs penelitian ini berada di beberapa desa yang berada di Kecamatan Teluknaga, kabupaten Tangerang, Banten.

Beberapa desa di Kecamatan ini yang akan diambil sebagai penelitian ialah Desa Tanjung Pasir, Desa Muara, Desa Tanjung Burung, dan Desa Salemban Jati. Lokasi ini dijadikan sebagai objek penelitian dikarenakan kehidupan masyarakat yang berada di daerah tersebut terdampak langsung dari adanya Pembangunan Reklamasi PIK 2.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa wilayah ini secara langsung terkena dampak reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Masyarakat di kawasan ini sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan petani tambak, sehingga perubahan lingkungan akibat reklamasi berdampak signifikan terhadap mata pencaharian dan kehidupan sosial-ekonomi mereka. Dengan menjadikan Kecamatan Teluknaga sebagai fokus penelitian, kita dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan reklamasi mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari.

1.9.3 Subjek Penelitian

Dalam menentukan informan yang tepat untuk penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* diterapkan dengan cara menentukan informan secara selektif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria ini mencakup pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterlibatan langsung dengan kebijakan reklamasi PIK 2, seperti tokoh masyarakat maupun warga yang terdampak langsung oleh proyek reklamasi tersebut.

Selanjutnya, untuk memperluas jangkauan dan memperdalam informasi yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* sebagai metode *complementer*. Dalam temuan Sugiyono (2016: hlm.219) menjelaskan teknik *snowball sampling* merupakan teknik yang digunakan saat pengambilan sampel data yang awalnya jumlahnya sedikit lama-lama akan menjadi besar. Hal ini akan dijadikan sebagai sumber data untuk melengkapi penelitian adalah beberapa individu yang akan dijadikan sebagai informan guna memperoleh data yang kuat.

Melalui teknik ini, informan yang telah diwawancarai kemudian diminta untuk merekomendasikan informan lain yang dianggap memiliki informasi relevan dan mendalam terkait dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan reklamasi PIK 2. Proses ini berlangsung secara berantai, dimana setiap informan dapat mengarahkan peneliti kepada informan lainnya, sehingga memungkinkan peneliti untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang terdampak dan

mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Penggunaan kedua teknik sampling ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam dari berbagai sudut pandang. Melalui purposive sampling, peneliti dapat memastikan bahwa informan yang dipilih benar-benar memiliki kapasitas dan relevansi dengan topik penelitian, sementara snowball sampling membantu peneliti mengidentifikasi informan-informan kunci yang mungkin tidak terdeteksi pada awal penelitian. Kombinasi kedua teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk memvalidasi informasi yang diperoleh melalui triangulasi sumber data, sehingga meningkatkan kredibilitas dan keabsahan hasil penelitian mengenai dampak sosial dan ekonomi kebijakan reklamasi PIK 2 terhadap masyarakat Kecamatan Teluknaga.

Dalam hal ini subjek penelitian sangatlah krusial untuk memenuhi sebuah informasi dan data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, pada nantinya yang akan menjadi subjek penelitian guna diwawancarai ialah seorang warga yang menggantungkan hidupnya pada SDA setempat dan beberapa warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Teluknaga yang merasakan dampak langsung dari adanya pembangunan PIK 2.

1.9.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data berupa teks, foto, dan data deskriptif. Jenis data ini menggunakan sistem analisis data kualitatif. Data berupa teks dalam penelitian ini terkait adanya dampak yang ditimbulkan dari pembangunan reklamasi PIK 2 terhadap masyarakat dan lingkungan di beberapa

desa Kecamatan Teluknaga. Sedangkan, data berupa foto adalah foto yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada saat melakukan pengumpulan data dalam penelitian merupakan tahapan yang banyak menghabiskan waktu dan biaya. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan peneliti mengumpulkan bahan nyata atau memperoleh informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan dalam sebuah penelitian. Apabila peneliti tidak mengetahui teknik saat pengumpulan data sehingga peneliti pun tidak akan mampu memperoleh data tersebut dengan kualifikasi data yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

1.9.5.1 Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi sebagai salah satu metode pengumpulan data yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya. Berbeda dengan wawancara dan kuesioner yang terbatas pada interaksi dengan manusia, observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati tidak hanya interaksi sosial masyarakat, tetapi juga berbagai aspek fisik dan lingkungan yang berkaitan dengan dampak reklamasi PIK 2 di Kecamatan Teluknaga. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan seluruh kemampuan panca indera untuk melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap berbagai fenomena yang terjadi di lapangan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan panduan pengamatan sebagai instrumen observasi yang telah dirancang secara sistematis. Panduan ini membantu peneliti untuk tetap fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti perubahan kondisi lingkungan pesisir, aktivitas ekonomi masyarakat, pola interaksi sosial, serta berbagai dampak fisik dan non-fisik lainnya yang timbul akibat proyek reklamasi. Peneliti melakukan observasi langsung dengan turun ke berbagai desa di Kecamatan Teluknaga untuk mengamati dan mencatat secara detail setiap fenomena yang dianggap signifikan.

1.9.5.2 Wawancara

Dalam mengumpulkan data yang mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi kebijakan reklamasi PIK 2, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) sebagai instrumen utama pengumpulan data. Wawancara dilakukan secara intensif dengan masyarakat Kecamatan Teluknaga yang terdampak langsung oleh proyek reklamasi, khususnya mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam pesisir seperti nelayan tradisional, petambak, dan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan reklamasi. Proses wawancara dilaksanakan baik secara tatap muka langsung maupun melalui media komunikasi seperti telepon atau teleconference, menyesuaikan dengan ketersediaan dan preferensi informan.

Demi memastikan kualitas dan kedalaman informasi yang diperoleh, peneliti telah menyusun pedoman wawancara yang komprehensif mencakup berbagai aspek dampak sosial-ekonomi yang ingin digali. Pedoman ini

mencakup pertanyaan-pertanyaan kunci seputar perubahan pola mata pencaharian, pendapatan warga yang bergantung pada SDA, akses terhadap sumber daya pesisir, relokasi dan intimidasi, perubahan struktur sosial masyarakat, kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta berbagai tantangan dan peluang yang muncul sebagai dampak dari proyek reklamasi. Meskipun menggunakan pedoman wawancara, peneliti tetap mempertahankan fleksibilitas dalam proses wawancara untuk mengeksplorasi isu-isu penting yang muncul secara spontan selama percakapan berlangsung.

Wawancara mendalam ini difokuskan untuk menggali pengalaman langsung dan perspektif masyarakat yang paling terdampak, terutama mereka yang mengalami perubahan signifikan dalam aspek sosial dan ekonomi kehidupannya. Melalui dialog yang mendalam dan personal, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan reklamasi PIK 2 mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, strategi adaptasi yang mereka kembangkan, serta harapan dan kekhawatiran mereka terhadap masa depan komunitas pesisir di Kecamatan Teluknaga. Informasi yang diperoleh melalui wawancara ini menjadi data primer yang sangat berharga dalam menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan reklamasi tersebut.

1.9.6 Sumber Data

Dalam sebuah penelitian atau riset terkait berbagai permasalahan yang ada data menjadi elemen terpenting, karena dengan adanya data peneliti dapat mengetahui hasil akhir atau sebuah jawaban dari penelitian yang sudah

dilakukan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data untuk mendukung hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, diantaranya sebagai berikut:

1.9.6.1 Data Primer

Data primer memiliki peranan yang penting karena data ini merupakan data yang paling akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena diambil secara langsung, selain itu data ini dijadikan sebagai data utama dalam sebuah penelitian. Dikarenakan fokus penelitian ini adalah timbulnya masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan dari adanya sebuah pembangunan maka peneliti pun melakukan observasi terhadap daerah tersebut dan melakukan wawancara langsung ke masyarakat yang merasakan langsung dampak dari pembangunan tersebut.

1.9.6.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung. Dalam penelitian ini data sekunder yang didapatkan peneliti berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti jurnal, buku ataupun penelitian terdahulu yang mana memiliki relevansi dengan penelitian yang diteliti.

Dengan demikian, peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni data primer dan sekunder. Data Primer digunakan oleh peneliti agar dapat lebih bisa melakukan analisis data lebih dalam sesuai pada kenyataannya. Sedangkan, data sekunder dapat dijadikan sebagai data pelengkap kebutuhan peneliti.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data secara simultan dengan proses pengumpulan data, mengikuti karakteristik penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk secara terus-menerus memperdalam dan memperluas pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Dalam mengkaji dampak sosial dan ekonomi kebijakan reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK 2) terhadap masyarakat Kecamatan Teluknaga, analisis data menjadi tahapan krusial yang menentukan kedalaman dan kualitas temuan penelitian. Proses analisis ini tidak hanya dilakukan pada tahap akhir penelitian, melainkan berlangsung sejak awal pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memodifikasi strategi pengumpulan data sesuai dengan perkembangan temuan yang diperoleh.

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang memungkinkan pengolahan data dari berbagai sumber menjadi informasi yang bermakna dan komprehensif. Data-data yang diperoleh dari hasil observasi langsung di lapangan serta wawancara mendalam dengan masyarakat terdampak di Kecamatan Teluknaga diolah melalui beberapa tahapan sistematis, mulai dari reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola dan hubungan antar fenomena yang teridentifikasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkapkan berbagai dimensi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan reklamasi PIK 2 secara mendalam dan kontekstual.

Dalam analisis data ini, peneliti juga melakukan interpretasi terhadap temuan-temuan empiris dengan menggunakan landasan teoritis yang relevan mengenai kebijakan publik, perubahan sosial, dan pembangunan ekonomi. Interpretasi ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memaparkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan secara deskriptif, tetapi juga mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial-ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan reklamasi tersebut. Dengan demikian, hasil analisis data dalam penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran faktual mengenai perubahan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Teluknaga, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dalam memahami relasi antara kebijakan reklamasi pesisir dengan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.

1.9.7.1 Reduksi data

Dalam penelitian mengenai kebijakan reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dan dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Teluknaga, teknik reduksi data memegang peranan vital dalam menghasilkan informasi yang bermakna dan tepat sasaran. Proses reduksi data dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis yang meliputi rangkuman temuan lapangan, penyeleksian data yang relevan dengan tujuan penelitian, serta pemfokusan pada informasi krusial terkait perubahan sosial-ekonomi masyarakat akibat kebijakan reklamasi tersebut. Data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dengan warga terdampak, observasi lapangan di kawasan reklamasi, serta dokumentasi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar,

diolah secara cermat untuk menyingkirkan informasi yang tidak esensial dan mempertahankan substansi yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Teknik reduksi ini sangat membantu peneliti dalam menyederhanakan kompleksitas fenomena dampak reklamasi PIK 2, sehingga pola-pola perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Teluknaga dapat teridentifikasi dengan jelas. Dengan demikian, teknik reduksi data tidak hanya berfungsi sebagai proses penyaringan informasi, tetapi juga sebagai landasan penting dalam penarikan kesimpulan yang komprehensif mengenai dampak kebijakan reklamasi terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

1.9.7.2 Penyajian data

Dalam penelitian tentang kebijakan reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dan dampaknya terhadap masyarakat Kecamatan Teluknaga, teknik penyajian data berperan strategis dalam mengorganisasikan informasi yang telah melalui proses reduksi. Deskripsi naratif yang sistematis disajikan untuk menggambarkan temuan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan warga terdampak, yang memperkaya dimensi kualitatif penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan relasi kompleks antara kebijakan reklamasi dan transformasi sosial-ekonomi masyarakat dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Teknik penyajian data yang komprehensif ini tidak hanya memfasilitasi analisis mendalam tentang dampak reklamasi PIK 2, tetapi juga memberikan landasan empiris yang kuat untuk perumusan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Teluknaga.

1.9.7.3 Menarik kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kata menarik berarti hanya merangkum memindahkan dari bagian yang sudah ada ke bagian yang lain. Kesimpulan penelitian kualitatif diperoleh dari teori yang disusun awal mengenai masalah, hasil penelitian, dan pembahasan yang diikuti. Semua permasalahan dan penyelesaiannya dihubungkan dan dilibatkan dengan teori yang dipakai, yang kemudian dilanjutkan pada kesimpulan.

Pada dasarnya peneliti akan menerapkan prinsip induktif dengan memperhitungkan kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat ataupun pola-pola data yang ada. Validasi data dilakukan untuk mengetahui data akhir dari setiap tahapan analisis, hal ini akan memungkinkan kita untuk menjawab permasalahan dan memberikan kontribusi positif bagi permasalahan pembangunan PIK 2.